

**PERAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN MASA
PANDEMI COVID-19 DI PESISIR PANTAI UTARA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020**

Moch Yusron Ulul Azmi
Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Majapahit
Email: azamalubaid14@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Perikanan merupakan instansi Pemerintah Daerah bidang perikanan. Tujuan Dinas Kabupaten Lamongan yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat. Potensi perikanan Kabupaten Lamongan sangat besar, tercatat pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap tahun 2020 mencapai 79.819,32 Ton sedangkan pada produksi perikanan budidaya mencapai 59.728,00 Ton pada tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan masa pandemi Covid 19 di pesisir pantai utara Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk menganalisisnya dengan menggunakan teori peran dari Biddle dan Thomas. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa peran Dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dimasa pandemi Covid 19 th 2020 dijalankan dengan baik. Berbagai upaya dalam bentuk bantuan dan program-program guna meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan telah dilaksanakan sebaik mungkin. Sehingga dalam upayanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dikatakan telah tercapai.

Kata kunci: Peran, Dinas Perikanan, Perekonomian Nelayan

ABSTRACT

The Fisheries Service is a Regional Government agency in the field of fisheries. The aim of the Lamongan Regency Service is to increase economic growth through optimizing the potential of the region and the people's economy to realize an increase in people's income. The fishery potential of Lamongan Regency is very large, it was recorded that in 2020 capture fisheries production in 2020 reached 79,819.32 Tons while in aquaculture production it reached 59,728.00 Tons in 2020. This research is a qualitative descriptive research, this type of case study research uses the data collection method. observational data, interviews and documentation studies. The purpose of this study was to find out the role of the Fisheries Service in improving the economy of fishing communities during the Covid 19 pandemic on the north coast of Lamongan Regency. Based on this, the researcher is interested in analyzing it using the role theory of Biddle and Thomas. The research results revealed that the role of the Fisheries Service in improving the community's economy during the Covid 19 2020 pandemic was carried out well. Various efforts in the form of assistance and programs to improve the economy of fishing communities have been carried out as well as possible. So that in its efforts to improve the community's economy it can be said to have been achieved.

Keywords: Role, Department of Fisheries, Fishermen's Economy

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 ditemukan Virus Corona atau Covid-2019 pertama kali di Wuhan, China. Tercatat 200 lebih negara telah mengabarkan terjangkit Covid 19. Virus corona atau Covid-19 ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut dengan WHO termasuk kedalam wabah penyakit sehingga perlu melakukan usaha pencegahan agar tidak terjadi peningkatan kasus (Kemenkes RI, 2020). Dalam usaha pencegahan yang dilakukan dengan menyelenggarakan kekarantina kesehatan (*UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan – JDIH BSSN, 2018*).

Proteksi terhadap kesehatan seluruh masyarakat dari wabah dengan menyelenggarakan karantina ialah keharusan yang dilakukan bersama baik Pemerintah (pusat atau daerah) tidak terkecuali masyarakat dari segala sesuatu serta penyebab dan resiko bagi kesehatan seluruh masyarakat yang mana akan mengakibatkan perihal darurat.

Tindakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar ditempuh sebagai bentuk kekarantina kesehatan, selain itu juga dengan melaksanakan kegiatan peninjauan (pengamatan) penyakit serta penyebab dan resiko kesehatan seluruh masyarakat. Penambahan kasus covid 19

berakibat pada berbagai bidang baik itu bidang sosial budaya, ekonomi, perpolitikan, pertahanan dan keamanan di Indonesia, sehingga saat ini dibutuhkan penindakan secara cepat terhadap Covid-19 guna menurunkan atau mengurangi penularan *virus corona* atau Covid-19 yang semakin meluap-luap (Hukumklik, 2020).

Salah satu daerah di Indonesia yang juga terdampak ialah Kabupaten Lamongan. Mewabahnya pandemi Covid 19 di Kabupaten Lamongan berimbas pula pada kegiatan ekspor dan kelangsungan hidup sejumlah perusahaan pengeksportir ikan di pesisir Pantai Utara Jawa Timur tersebut. Selain harga ikan laut terus menurun tajam, beberapa eksportir ikan terpaksa memilih menutup usahanya, karena ketidakmampuan beban biaya operasional yang telah dikeluarkan. Keadaan ini dialami pelaku usaha eksportir ikan dan para nelayan di pantai utara.

Kendati harga ikan laut turun drastis akibat dampak wabah corona, sebagian nelayan tetap memilih melaut demi memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sebagian nelayan lain, memilih tidak melaut dan beralih menjadi pengepul, sambil menunggu harga ikan stabil kembali. Para nelayan mengungkapkan, hasil dari penjualan ikan

tangkapan tidak sebanding dengan biaya oprasional yang telah di keluarkan nelayan, mulai dari bahan bakar solar hingga perbaikan alat tangkap. Pendapatan nelayan di pesisir pantai utara dirasakan terus merosot, sejak peningkatan kasus wabah Covid-19 pada tahun 2020. Kini para nelayan berharap ada solusi dari pemerintah daerah maupun pusat, agar roda perekonomian nelayan tetap berjalan di tengah wabah corona di tahun 2020. Instansi Daerah Kabupaten Lamongan yang khusus mengangani bidang perikanan ialah Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.

Bahwasannya perlu adanya sebuah penanganan terkait perekonomian masyarakat nelayan di pesisir pantai utara kabupaten Lamongan di tengah pandemi covid-19 ini oleh instansi terkait yakni Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Dilihat dari permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji ialah bagaimana peran Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di masa pandemi Covid 19 di pesisir pantai utara Kabupaten Lamongan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Peran dari Biddle & Thomas, Biddle dan Thomas

menerangkan perihal teori peran sebagai suatu rangkaian rumusan yang menentukan tindakan yang diinginkan dari seorang pemegang kedudukan (Sarlito, 2015).

Didalam teori peran terdapat 5 indikator yang keseluruhannya saling terkait, antara lain (Biddle, B. B., & Thomas, 1982):

Pertama, harapan, berkaitan sebagai suatu angan-angan orang lain mengenai tindakan yang selayaknya sesuai ditampakkan oleh orang yang memegang peranan tertentu. Harapan mengenai perilaku dapat bersifat universal, berasal dari individu maupun kelompok.

Kedua, Norma masuk kedalam bentuk harapan. Yang mana norma ditempatkan sebagai bagian dari harapan yang melekat pada peran maka sebagai suatu keharusan didalam peran. Keharusan peran tersebut yang terlebih dahulu melauai proses internalisasi dalam hubungan sosial baik pada masyarakat maupun di lingkup pekerjaan dapat menjadi norma dalam peran yang sedang dijalankan.

Ketiga, Wujud perilaku pada peran mengarah pada pencapai target sasaran tidak hanya harapan semata.

Wujud perilaku merupakan perwujudan dari harapan-harapan yang sebelumnya ada. Setiap aktor mewujudkan perilaku mereka dengan cara yang berbeda-beda, adanya perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang normal.

Keempat, evaluasi ialah pemberian kesan positif ataupun negatif yang berdasar sebuah harapan orang lain terhadap kedudukan yang dijalankan.

Kelima, sanksi merupakan usaha orang untuk mempertahankan sesuatu nilai positif ataupun supaya perwujudan peran diganti sedemikian rupa sehingga yang sebelumnya dinilai negatif menjadi positif sesuai dengan harapan serta norma di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari serta memahami suatu makna pada sejumlah individu atau sekelompok orang yang mana berpangkal dari masalah sosial (Creswell, 2019). Dengan jenis penelitian studi kasus.

Peneliti bertindak sebagai observer, yang mana melakukan pengamatan serta penelitian secara

langsung di lapangan dengan melakukan wawancara pada para nelayan serta pihak Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Pada waktu penelitian dilakukan, peneliti memperoleh dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer berupa transkrip wawancara, Undang-Undang, serta data-data lain perihal nelayan. Sedangkan data sekunder berupa referensi buku dan jurnal.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti ialah melakukan observasi ke lapangan baik itu di Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dan di pesisir pantai utara Kabupaten Lamongan. Selanjutnya melakukan wawancara secara langsung dengan informan dan yang terakhir melakukan studi dokumentasi dengan mengabadikan momen wawancara berupa foto.

Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan analisis model spiral yang dipopulerkan oleh John W. Creswell (Creswell, 2010) : (a) pengumpulan dan pengolahan data, (b) membaca, mencatat serta *Coding*, (c) deskripsi, klarifikasi dan menginterpretasi, (d) terakhir melakukan representasi dan visualisasi data yang telah didapatkan selama penelitian.

Pada pengecekan keabsahan data, peneliti memanfaatkan triangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.

PEMBAHASAN

Potensi perikanan di Kabupaten Lamongan sangat besar. Tercatat Tahun 2019 produksi tangkap laut mencapai sebesar 76.338,90 Ton dengan nilai produksi Rp. 1.198.122.258.000. Selain itu Kabupaten Lamongan juga memiliki potensi dalam produksi garam. Dengan lahan produksi seluas 227,42 Ha, produksi garam pada tahun 2019 mencapai 38.372 Ton, yang diusahakan oleh 23 kelompok Petambak Garam yang beranggotakan 290 orang dan 3 kelompok Wanita Perebus Garam dengan anggota 20 orang.

Potensi yang besar tersebut telah terbagi menjadi empat sektor yaitu Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Peningkatan Daya Saing Produk

Perikanan melalui produk olahan hasil perikanan serta Pengawasan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir melalui produksi garam. Keempat sektor tersebut merupakan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang bertempat di Jl. Sumargo Nomor 2 Lamongan, selaku dinas yang membawahi bidang-bidang tersebut. Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas dan kedudukan pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Kelautan dan Perikanan

Peran Dinas Perikanan Dalam Meningkatkan Perekonomian Nelayan di Pesisir Pantai Utara Kabupaten Lamongan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian nelayan maka Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan melaksanakan perannya selaku instansi pemerintah yang menjalankan kewenangan dalam otonomi daerah di bidang perikanan. Pelaksanaan peran oleh Dinas Perikanan oleh peneliti dianalisis menggunakan teori peran menurut Biddle

dan Thomas dengan lima aspek yang mendasarinya yakni :

- (a) Harapan yang ada ialah harapan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dan harapan masyarakat nelayan. Harapan Dinas Perikanan diperuntukkan agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai harapan dalam mengemban tugas perihal perikanan. Berdasar pada misi Kabupaten Lamongan tahun 2016-2019 yakni salah satunya mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah. Maka Dinas Perikanan berharap dengan adanya misi tersebut mendorong kemampuan dinas Perikanan untuk semakin baik terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain itu juga terdapat harapan dari masyarakat yang mana ini ditujukan kepada dinas perikanan untuk kelangsungan perekonomian masyarakat nelayan sendiri. Harapan masyarakat terhadap dinas yakni perihal bantuan sarana prasarana dan pemasaran serta penjualan hasil tangkap.
- (b) Norma atau patokan, dalam lingkup instansi pemerintahan perihal norma yang berupa tuntutan ialah tertuang

dalam kebijakan. Dalam menjalankan perannya, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perikanan salah satunya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan ialah melakukan pemberdayaan pada nelayan. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, dalam Perda Kabupaten Lamongan memuat tugas yang mana sebagai perumus kebijakan teknis serta strategis yakni Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dapat melaksanakan urusan pemerintahan beserta pelayanan umum, melakukan pembinaan serta pelaksanaan dalam bidang perikanan.

(c) Wujud perilaku, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan berdasarkan pada harapan dan norma sebelumnya menuangkan wujud perilaku yang nyata pada sumberdaya alam perikanan dan kepada masyarakat nelayan. Pada berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan perekonomian masyarakat nelayan. Program-program yang telah dijalankan oleh Dinas perikanan ialah : sosialisasi perihal kebijakan penangkapan ikan yang telah melarang menggunakan pukot dan tarik, sosialisasi konsevasi lingkungan pesisir pantai untuk senantiasa bersama-sama menjaga lingkungan sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat nelayan, sosialisasi keselamatan kerja dan pemberian pelampung, pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan membuat olahan ikan, penyaluran BLT kepada nelayan kecil, revitalisasi sarana dan prasarana, pemberian bibit ikan lele dan udang bagi para pembudidaya, melakukan restocking ikan ke laut untuk kelangsungan perkembangbiakan ikan agar lebih cepat, penyediaan dan pemberian

perlengkapan prokes untuk menekan penyebaran virus Covid 19 di lingkungan pesisir pantai utara.

Keseluruhan program yang ada tersebut diperuntukkan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid 19 saat ini.

(d) Evaluasi dan sanksi, pada penilaian yang diberikan oleh masyarakat kepada Dinas Perikanan ialah telah baik melakukan tugasnya dan berkontribusi aktif dalam peningkatan perekonomian masyarakat nelayan, telah dibuktikan pada pemenuhan tugas dalam wujud perilaku. Wujud perilaku yang diberikan oleh Dinas Perikanan terbukti menambah penilaian yang baik oleh masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perikanan juga baik, dikatakan bahwa Dinas Perikanan telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan para nelayan sehingga dapat membantu dalam perekonomian masyarakat.

Akan tetapi bantuan pemasaran hasil perikanan oleh Dinas Perikanan berupa slogan dan iklan belum

maksimal dapat dirasakan masyarakat. Karena masyarakat harus berusaha sendiri untuk dapat menjual hasil perikanan yang telah mereka dapatkan. Sedangkan sanksi yang ada saat ini timbul dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan oleh masyarakat dalam hal penerapan protokol kesehatan masa pandemi dan tindakan nelayan yang tetap menangkap ikan dengan alat tangkap tarik meskipun itu sudah dilarang.

Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan

Yang akan dipaparkan pada sub bab ialah suatu gambaran mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan peran Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan perekonomian nelayan. Sehingga faktor yang ada terdiri dari 2 yakni faktor pendukung dan faktor penghambat yang berpengaruh pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat nelayan.

- (a) Faktor Pendukung merupakan segala hal yang berkaitan dengan penunjang peran Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan perekonomian. Faktor pendukung terdapat faktor

internal yakni pihak dinas selalu tanggap dengan keadaan-keadaan di lapangan berupa program-program yang telah dijalankan, adanya motivasi yang sungguh-sungguh kuat dan kerjasama secara tim yang solid dari pihak Dinas Perikanan untuk dapat senantiasa memnuhi tugas dan tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di masa pandemi Covid 19 saat ini, ketersediaan alat transportasi yang mendukung sehingga dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk dapat lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat pesisir.

Sedangkan faktor eksternal yaitu partisipasi masyarakat nelayan terhadap pelaksanaan program selama di lapangan, masyarakat menaruh kepercayaan terhadap program-program pemerintah yang senantiasa melibatkan mereka maka dengan itu timbul penilaian positif terhadap pemerintah daerah yakni dinas perikanan kabupaten lamongan.

- (b) Faktor Penghambat merupakan sesuatu hal yang akan berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan tugas Dinas

Perikanan Kabupaten Lamongan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Faktor penghambat yang ada terdapat dua yakni faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor penghambat internal yakni Sedangkan faktor penghambat internal ialah kemampuan pengawasan yang masih kurang dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan untuk melakukan operasi dan pencegahan masyarakat yang masih saja ada menggunakan alat tangkap pukat Hella dan tarik, sehingga untuk itu personil yang ada tidak dapat langsung menjangkau seluruh pesisir di Kabupaten Lamongan. Selain itu bantuan pemasaran yang kurang sebab pemanfaatan slogan dan iklan yang sangat umum maka kurang berdampak pada masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat eksternal ialah masih saja ditemukan masyarakat yang kurang aktif untuk berpartisipasi dalam program pemerintah seperti kurang tanggapnya memmberikan

data-data sehingga penyaluran bantuan kurang merata padahal penyaluran bantuan tersebut hanya untuk kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri

PENUTUP

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya peran Dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dimasa pandemi Covid 19 th 2020 dijalankan dengan baik. Berbagai upaya dalam bentuk bantuan dan program-program guna meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan telah dilaksanakan sebaik mungkin.

Berdasarkan pada kelima aspek dalam analisis peran Dinas Perikanan maka ditemukan faktor pendukung eksternal yang ada ialah kerjasama yang baik dari mayoritas masyarakat dan Dinas Perikanan perihal data yang dibutuhkan, baik itu data masyarakat nelayan, data sarana prasana, data kapal yang secara valid telah diberikan masyarakat kepada Dinas Perikanan. Selain itu juga terdapat faktor pendukung internal yakni daya tanggap dan respon yang diberikan Dinas terhadap masyarakat sangat baik, motivasi dan kerjasama tim yang sangat

kuat dan ketersediaan alat transportasi yang menunjang pelaksanaan kerja sewaktu dilapangan.

Sedangkan faktor penghambat eksternal terlihat dari perilaku sebagian masyarakat yang kerap telat dalam menyetorkan data sehingga pendataan dan penyaluran bantuan menjadi terhambat. Sehingga dalam upayanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dikatakan telah tercapai. Selain itu faktor penghambat internal nampak dari kemampuan pengawasan yang masih kurang dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan untuk melakukan operasi dan pencegahan masyarakat yang masih saja ada menggunakan alat tangkap pukat dan Hella. Selain itu bantuan pemasaran dirasakan masyarakat kurang maksimal dapat berdampak langsung dan dirasakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Biddle, B. B., & Thomas, E. J. (1982). Role Theory: Concepts and Reseach. In *New York* (p. 202). Wiley.
- Creswell, J. W. (2010). desain dan model penelitian kualitatif (biografi, fenomenologi, teori grounded, etnografi, dan studi kasus). In *fakultas ilmu pendidikan universitas negeri malang*.
- Creswell, J. W. (2019). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. In *Yogyakarta*. Pustaka Pelajar.
- Hukumklik. (2020). *Corona: Prosedur*

Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB").

<https://hukumclick.wordpress.com/2020/04/01/corona-prosedur-pembatasan-berskala-besar-ppsbb/>

Sarlito, S. (2015). Teori-Teori Psikologi Sosial. In *Jakarta*. PT. Raja Grafindo Persada.

UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kecharantinaan Kesehatan – JDIH BSSN, (2018) (testimony of Ir. H. Joko Widodo).

<https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/uu-nomor-6-tahun-2018-tentang-kekarantinaan-kesehatan>